

**PEMERINTAH DAN LINGKUNGAN (STUDI PENANGGULANGAN
POLUSI UDARA DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013)**

Oleh:

Heru Yolanda

Email : heruyolanda@yahoo.co.id

Pembimbing : Dr.Muchid,S.Sos.,M.Phil

**Program Studi : Ilmu Pemerintahan – Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl.H.R Soebrantas Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax.0761-63277**

ABSTRACT

This study in the background backs by environmental problems occurring in Riau province precisely in Bengkalis in 2013 and which became a severe problem is the problem of air pollution caused by smog from forest fires caused by parties who are not responsible responsibility. Basically a lot of things that can be done to reduce this land arson case made by parties who are not responsible, resulting in increasing the intensity of smog or air pollution in the region Bengkalis. Things to do such as enhanced supervision across the forest area of Riau to procure various outreach programs for the community to be able to preserve hutan. Sebagai footing Theoretically, this study uses the theory of supervision Inu Kencana and Syaufina land and forest fires. research using qualitative methods, while the data collection techniques in doing is to interview and observasi. Sedangkan data analysis using descriptive analysis.

The findings indicate dilapanagan fire conditions are not well coordinated, causing a devastating fire that wiped out forests in Bengkalis, thus the supervision of the Government in the District Bengkalis not run with good. This is evident from forest fires occurring continuously menerus. Upaya outage been executed, but because of the many obstacles, handling becomes slow and the effects that arise (such as smog)'ve got to Singapore and Malaysia. A number of the accused as the perpetrator has been processed, although the penalty imposed does not make them jera. Ketidakefektifan handling terlihat dari also continued occurrence of forest fires in Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Provinsi Riau tepatnya di

Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 lalu yang menjadi permasalahan yang cukup parah adalah permasalahan polusi udara yang diakibatkan oleh kabut asap dari kebakaran hutan yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebakaran

diperkirakan berasal dari lahan milik warga, karena itu Pemkab Bengkalis langsung mengeluarkan Surat Edaran agar masyarakat jangan membuka lahan dengan membakar. Kebakaran di Pulau Bengkalis sudah menghanguskan sekira 150 hektare lahan. Api menyebar karena dipicu angin kencang, cuaca yang kering dan lahan gambut yang banyak terdapat di Bengkalis. Untuk karhutla di CB-GSK-BB, data luas lahan yang terbakar berada di BKSDA Riau serta BPBD-Damkar. Berdasarkan data karhutla yang ada, mayoritas lahan yang terbakar merupakan lahan milik masyarakat, baik yang sudah ditanami maupun lahan kosong yang diduga dibakar saat melakukan land clearing (pembersihan lahan). Pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap setiap kejadian yang dihadapi oleh daerah-daerahnya. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pemerintah berdasarkan kekuasaan konstitusi UUD 1945 berhak untuk mengatur dan mengurus masyarakat dalam hal kepentingan umum. Sehingga dalam konteks birokrasi harus mampu mewujudkan tujuan Nasional, yaitu: tercapainya masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera. Termasuk Fungsi Pelayanan Kesehatan yang merupakan tugas birokrasi sebagai alat pemerintahan. Masyarakat tentunya berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal tanpa memandang status sosial. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengendalikan dan menyempurnakan layanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat dalam bentuk regulasi.

Pada kenyataannya kondisi kebakaran tersebut tidak terkoordinir

dengan baik sehingga terjadi kebakaran hebat yang menyalakan hutan-hutan di Bengkalis, dengan demikian pengawasan Pemerintah di Kab Bengkalis tidak berjalan dengan baik. Seharusnya dengan pengawasan yang baik terlebih dahulu sebelum terjadinya kebakaran terhadap kondisi hutan di Kab Bengkalis, Dinas Kehutanan mampu menangani kebakaran atau mengantisipasi terjadinya kebakaran yang besar tersebut. Pada kasus ini Dinas Kehutanan hanya melakukan pemantauan setelah terjadinya titik titik api saja. Hal ini sangat tidak efisien dilakukan, dengan kata lain, pemantauan yang dilakukan telah terlambat.

Berangkat dari banyaknya permasalahan lingkungan yang menyebabkan permasalahan kesehatan itulah penulis tertarik untuk memilih judul **“Pemerintah dan Lingkungan (Studi Penanggulangan Polusi Udara di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena di atas yang telah penulis uraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana pengawasan pemerintah dalam penanggulangan polusi udara di Kabupaten Bengkalis?
2. Faktor - Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan di Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengawasan pemerintah dalam penanggulangan polusi udara di Kabupaten Bengkalis

b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan di kabupaten bengkalis

2. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang penulis dapat selama perkuliahan.

b. Sebagai bahan pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan.

2. Secara Praktis

a. Diharapkan sebagai salah satu pertimbangan dan masukan bagi pemerintah di lingkungan Kabupaten Bengkalis.

b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas tentang penanggulangan kasus polusi udara yang terjadi di provinsi Riau selama tahun 2013 khususnya hingga saat ini.

D. Konsep Teori

1. Pengawasan Pemerintah

Pemerintah berdasarkan kekuasaan konstitusi UUD 1945 berhak untuk mengatur dan mengurus masyarakat dalam hal kepentingan umum. Sehingga dalam konteks birokrasi harus mampu mewujudkan tujuan Nasional, yaitu: tercapainya masyarakat maju, mandiri, dan sejahtera. Termasuk Fungsi Pelayanan Kesehatan yang merupakan tugas birokrasi sebagai alat pemerintahan. Masyarakat tentunya berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal tanpa memandang status sosial. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam mengendalikan dan

menyempurnakan layanan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat dalam bentuk regulasi.

Regulasi adalah pengendalian yang berkesinambungan dan terfokus yang dilakukan oleh lembaga publik terhadap kegiatan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan Regulasi Pelayanan Kesehatan merupakan upaya publik untuk memberikan pengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap perilaku dan fungsi organisasi maupun perorangan yang menyediakan pelayanan kesehatan .

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Bentoro, Cokroamidjojo. 2006:88)

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. (Tri Nuke Pudjiastuti, Miriam Budiardjo, 2006:47)

Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”. (Pemudji.2005:88)

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan

kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. (Sukarno. 2012:42)

2. Kebakaran Hutan dan Lahan

a. Definisi dan Tipe Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan adalah suatu kejadian dimana api melalap bahan bakar bervegetasi yang terjadi di kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali. Berbeda dengan kebakaran hutan, jika api melalap bahan bakar bervegetasi yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali di kawasan bukan hutan maka disebut kebakaran lahan.

Kebakaran hutan dapat dikelompokkan pada tiga tipe. Pengelompokkan tersebut didasarkan kepada bahan bakar yang mendominasi kebakaran. Tiga tipe kebakaran (Syaufina 2008), yaitu :

a. Kebakaran bawah (Ground Fire):

Kebakaran bawah yaitu situasi dimana api membakar bahan organik di bawah permukaan serasah.

Penjalaran api yang perlahan dan tidak dipengaruhi oleh angin menyebabkan tipe kebakaran seperti ini sulit untuk dideteksi dan dikontrol. Kebakaran bawah adalah tipe kebakaran yang umum terjadi di lahan gambut.

b. Kebakaran permukaan (Surface fire)

Kebakaran permukaan yaitu situasi dimana api membakar serasah, tumbuhan bawah, bekas limbah pembalakan dan bahan bakar lain yang terdapat di lantai hutan. Kebakaran permukaan adalah tipe kebakaran yang umum terjadi di semua tegakan hutan.

c. Kebakaran tajuk (Crown fire)

Kebakaran tajuk yaitu situasi dimana api menjalar dari tajuk pohon satu ke tajuk pohon yang lain yang saling berdekatan. Kebakaran tajuk sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin. Kebakaran tajuk sering terjadi di tegakan hutan konifer dan api

berasal dari kebakaran permukaan.

b. Faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan

Penyebab kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam (biofisik) dan faktor manusia.

c. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan mempunyai dampak positif maupun negatif. Diperlukan pengkajian yang mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan. Menurut Adinugroho et al. (2005), dampak kebakaran hutan dan lahan gambut yaitu adanya degradasi lingkungan, gangguan kesehatan dan masalah ekonomi.

1. Degradasi lingkungan

Kebakaran lahan gambut menyebabkan penurunan porositas total, penurunan kadar air tersedia, penurunan permeabilitas dan meningkatkan kecepatan lindak. Dampak kebakaran terhadap sifat fisik tanah ditentukan oleh frekuensi terjadinya kebakaran, derajat kerusakan/dekomposisi yang ditimbulkan dan pemanasan yang terjadi di permukaan yang dipengaruhi oleh ketersediaan bahan bakar (Adinugroho et al. 2005). Kebakaran yang menyebabkan meningkatnya suhu di permukaan mengakibatkan meningkatnya suhu di bawah permukaan (gambut) yang mengakibatkan tidak sedikit gambut yang terbakar. Kebakaran gambut dapat merubah sifat fisik maupun kimia tanah gambut secara signifikan. Perubahan sifat fisik yaitu adanya perubahan struktur tanah yang mengakibatkan tanah dengan kadar bahan organik rendah akan mempunyai bulk density yang rendah sehingga meningkatkan kesarangan tanah. Pemanasan mengakibatkan terganggunya lapisan atas tanah yang berpengaruh juga terhadap penurunan pori tanah lapisan bawah. Sehingga kemudahan permeabilitas tanah akan berkurang yang menyebabkan penurunan kandungan air yang tersedia. Pori-pori yang mengecil dan kepadatan tanah akibat kebakaran menyebabkan kemampuan tanah untuk air tanah berkurang (Syaufina 2008).

4. Langkah Penanggulangan Kebakaran Hutan oleh Pemerintah

Kebakaran hutan merupakan ancaman tersendiri bagi Negara yang bersangkutan maupun bagi masyarakat duni secara umum. Telah dipahami

bahwa hutan memegang peranan yang penting bagi keseimbangan hidup di bumi. Alpanya hutan menjaga bumi akan berimbang pada hidup organisme termasuk manusia di dalamnya. Oleh sebab itu, keberlangsungan hutan bukanlah sebuah opsi tetapi sebuah keharusan. Sayangnya, beberapa tahun belakangan, kerusakan terhadap hutan seolah tak bisa dicegah. Angka statistik menunjukkan fakta semakin berkurangnya areal hutan hari demi hari. Salah satu penyebabnya adalah kebakaran, baik itu yang terjadi secara alamiah maupun karena campur tangan manusia. Langkah penanggulangan kebakaran hutan perlu digalakkan sebab jika tidak, bukan hal yang tak mungkin kelak bumi bukan lagi planet yang nyaman dihuni anak cucu kita sebagai generasi selanjutnya.

E. Defenisi Konseptual

Konsep operasional ini di buat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arah dalam penelitian ini, maka dirasa perlu untuk memberikan batasan judul penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Pemerintah yang di maksud disini adalah proses dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus polusi udara yang terjadi di Kabupaten Bengkalis khususnya dan Riau pada umumnya.

2. Kasus polusi udara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kasus kabut asap yang terjadi di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang diakibatkan oleh pembakaran lahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan (Sugiyono, 2006:11).

Penelitian ini memusatkan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Maka memecahkan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan data status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu instansi yang diberi wewenang untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan kasus polusi udara di Kabupaten Bengkalis.

2. Informan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Fakta yang dibutuhkan meliputi kata-kata dan tindakan informan yang memberikan data dan informasi tentang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui proses pengamatan dan wawancara.

a.

3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan, maka data yang diperlukan antara lain:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber informasi atau informan penelitian melalui wawancara langsung mengenai pengawasan yang dilakukan dalam penanganan polusi udara yang terjadi di Kabupaten Bengkalis.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder

dari data yang dibutuhkan. Sumber data ini dapat diperoleh dari jurnal atau laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku, internet, koran, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu tentang birokrasi pelayanan, buku petunjuk administrasi kependudukan serta laporan tahunan mengenai pembuatan akta kelahiran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data atau informasi yang digunakan sebagai bahan penelitian. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan beberapa teknik antara lain :

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab (*interview*) dengan informan. Adapun dalam penelitian ini wawancara yang akan dilakukan yaitu tentang pengawasan yang dilakukan dalam penanganan polusi udara yang terjadi di Kabupaten Bengkalis.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dengan melihat objek secara langsung atau pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan terhadap objek yang diteliti. Adapun yang diobservasi dalam rencana penelitian ini yaitu di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Bengkalis.

5. Analisis Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel.

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).

Dengan menggunakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif artinya penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan dilakukannya wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Kemudian data-data tersebut dianalisa sedemikian rupa sehingga diambil kesimpulan secara deskriptif pula.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Bengkalis

Secara historis wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, sebagian besar berada di wilayah pemerintahan kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan kekuasaan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarief Qasim II, maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Indrapura, termasuk Wilayah Kabupaten Tingkat II Bengkalis dibawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pada tahun 1956 yakni berdasarkan Undang Undang Nomor 12 tahun 1956 dibentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang pada saat itu masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat

pemerintahan berkedudukan di Sumatera Utara. Dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Riau yang berdasarkan Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Daerah Tingkat I Riau.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau dengan ibukota Bengkalis yang berada di Pulau Bengkalis, terpisah dari Pulau Sumatera. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis 11.481,77 Km², terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Tercatat sebanyak 26 pulau utama disamping pulau-pulau kecil lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sejumlah 658.034 jiwa.

Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut, dengan temperatur 260C – 320C. Musim hujan terjadi sekitar bulan September – Januari dan musim kemarau terjadi sekitar bulan Februari hingga Agustus.

Bengkalis merupakan daerah yang terdiri dari dataran-dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata sekitar 1-6,1 m di atas permukaan laut. Di daerah ini juga terdapat beberapa sungai, tasik (danau), serta 26 Pulau besardan kecil. Pulau-Pulau besar itu adalah Pulau Rupat (1.524,84 km²), Pulau Tebing Tinggi (1.436,83 km²), Pulau Bengkalis (938,40 km²), Pulau Rangsang (922,10 km²), Pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km²).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengawasan Pemerintah dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan

Upaya untuk menangani kebakaran hutan ada dua macam, yaitu penanganan yang bersifat represif dan penanganan yang bersifat preventif. Penanganan kebakaran hutan yang bersifat represif adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kebakaran hutan setelah kebakaran hutan itu terjadi. Penanganan jenis ini, contohnya adalah pemadaman, proses peradilan bagi pihak-pihak yang diduga terkait dengan kebakaran hutan (secara sengaja), dan lain-lain.

Sementara itu, penanganan yang bersifat preventif adalah setiap usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghindarkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Jadi penanganan yang bersifat preventif ini ada dan dilaksanakan sebelum kebakaran terjadi. Selama ini, penanganan yang dilakukan pemerintah dalam kasus kebakaran hutan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, lebih banyak didominasi oleh penanganan yang sifatnya represif. Berdasarkan data yang ada, penanganan yang sifatnya represif ini tidak efektif dalam mengatasi kebakaran hutan di Indonesia.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis.

1. Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan di

Kabupaten Bengkalis, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keaslian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, baik secara prosedur, system, proses dan teknis dalam organisasi.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan pegawai dinas kehutanan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam segi pendidikan personil hanya tingkat SLTP/SLTA dan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan ataupun pemadaman, mereka melakukan pendidikan dan penyuluhan dengan sasaran utama adalah masyarakat. Sebab, masyarakat belum memiliki kesadaran yang penuh tentang arti kelestarian lahan dan bahaya yang ditimbulkan dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu juga jika terjadi kebakaran lahan, masyarakat orang yang paling dekat dengan lahan dan mereka dapat melakukan pemadaman lebih awal. Dan sebelum mereka jadi regu mereka di ajarkan terlebih dahulu bagaimana untuk memadamkan api.

2. Sumber daya pendukung

Dalam melakukan Pengawasan serta pemadaman lahan sumber daya manusia dan sumber daya pendukung merupakan faktor penting. Ketersediaan sumber daya manusia dan pendukung seperti peralatan yang memadai akan mempermudah dan mempercepat proses pemadaman jika terjadi kebakaran lahan setelah peralatan yang cukup maka personil atau tim pemadam kebakaran akan kuwalahan dan kesulitan untuk melaksanakan tugasnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala BPBD Damkar dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satlakdalkarhutla

kebakaran lahan masih minim atau bisa dikatakan belum maksimal. Dengan peralatan yang minim maka akan memperhambat proses pengawasan dan pemadaman api pada daerah yang terjadi kebakaran lahan.

3. Dana/ Biaya

Dalam suatu organisasi baik yang kecil ataupun yang komplek pasti sangat membutuhkan dana untuk menjalankan program- program yang telah direncanakan oleh organisasi tersebut. Tanpa adanyadana yang mendukung maka program yang telah direncanakan tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala bagian pembinaan dan pengawasan bahwasannya pengawasan dapat dilakukan secara rutin jika dana yang dialokasikan tercukupi, sebaliknya jika tidak adanya dana maka pengawasan tidak dilakukan secara maksimal sebab kurangnya dana untuk membeli perlengkapan dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu dipandang sangat perlu untuk mengalokasikan dana yang cukup besar untuk kegiatan penanggulangan dan pengawasan kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis.

4. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan lahan ini dapat berupa pengaduan atau melapor adanya pelanggaran yang dilakukan oleh personil dari Dinas Kehutanan dan

Perkebunan dalam hal kebakaran lahan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dapat digambarkan bahwasannya masih kurangnya partisipasi masyarakat atau belum maksimalnya keikutsertaan masyarakat dalam hal keikutsertaan dalam menjaga atau mencegah kebakaran yang terjadi. Walaupun sudah di himbau dari pihak pemerintah akan tetapi masyarakat juga tidak peduli dengan berbagai alasan yang ada yang menurutnya layak untuknya untuk tetap melakukan pembakaran.

Kurangnya partisipasi masyarakat ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih membuka lahan baru dengan cara membakar, padahal pemerintah telah menjelaskan hukuman kepada masyarakat yang membuka lahan baru dengan cara membakar lahan. Namun masyarakat tidak menghiraukan himbauan dari pemerintah tersebut sehingga kebakaran lahan terus terjadi di kabupaten Bengkalis ini.

5. Penanggulangan Kebakaran Hutan di Bengkalis

Penanggulangan hutan di Indonesia telah di atur dengan jelas di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-Ii/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. Adapun upaya penanggulangan yang dimaktub tersebut antara lain:

1. Memberdayakan sejumlah posko yang bertugas menanggulangi kebakaran hutan di semua tingkatan. Pemberdayaan ini juga harus disertai dengan langkah pembinaan terkait tindakan apa saja yang harus dilakukan jika kawasan hutan telah memasuki status Siaga I dan juga Siaga II.

2. Memindahkan segala macam sumber daya baik itu manusia,

perlengkapan serta dana pada semua tingkatan mulai dari jajaran Kementerian Kehutanan hingga instansi lain bahkan juga pihak swasta.

3. Memantapkan koordinasi antara sesama instansi yang saling terkait melalui dengan PUSDALKARHUTNAS dan juga di level daerah dengan PUSDALKARHUTDA tingkat I dan SATLAK kebakaran lahan dan juga hutan.

4. Bekerjasama dengan pihak luar seperti Negara lainnya dalam hal menanggulangi kebakaran hutan. Negara yang potensial adalah Negara yang berbatasan dengan kita misalnya dengan Malaysia berama pasukan BOMBA-nya. Atau juga dengan Australia bahkan Amerika Serikat.

Upaya penanggulangan kebakaran hutan ini tentunya harus sinkron dengan upaya pencegahan. Sebab walau bagaimanapun, pencegahan jauh lebih baik dari memanggulangi. Ada beragam cara yang bisa dilakukan dalam rangka mencegah kebakaran hutan khususnya yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti membuang puntung rokok di wilayah yang kering, kegiatan pembukaan lahan dan juga api unggun yang lupa dimatikan. Upaya pencegahannya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya mereka yang berhubungan langsung dengan hutan. Masyarakat ini biasanya tinggal di wilayah hutan dan memperluas area pertaniannya dengan membakar. Pemerintah harus serius mengadakan sosialisasi agar hal ini bisa dicegah.

Pada dasarnya upaya penanggulangan kebakaran hutan juga bisa disempurnakan jika pemerintah mau memanfaatkan teknologi semacam bom air. Atau bisa juga lebih lanjut ditemukan metode yang lebih

efisien dan ampuh menaklukkan kobaran api di hutan. Langkah yang paling baik adalah dengan mengikutsertakan para perangkat pendidikan agar merancang teknologi maupun metode yang membantu pemerintah di level praktis. Sokongan dana dari pemerintah akan membuat program tersebut lebih baik dan terarah.

6. Penanggulangan Kebakaran Hutan di Bengkulu

Penanggulangan hutan di Indonesia telah di atur dengan jelas di dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-Ii/2009 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. Adapun upaya penanggulangan yang dimaktub tersebut antara lain:

5. Memberdayakan sejumlah posko yang bertugas menanggulangi kebakaran hutan di semua tingkatan. Pemberdayaan ini juga harus disertai dengan langkah pembinaan terkait tindakan apa saja yang harus dilakukan jika kawasan hutan telah memasuki status Siaga I dan juga Siaga II.

6. Memindahkan segala macam sumber daya baik itu manusia, perlengkapan serta dana pada semua tingkatan mulai dari jajaran Kementerian Kehutanan hingga instansi lain bahkan juga pihak swasta.

7. Memantapkan koordinasi antara sesama instansi yang saling terkait melalui dengan PUSDALKARHUTNAS dan juga di level daerah dengan PUSDALKARHUTDA tingkat I dan SATLAK kebakaran lahan dan juga hutan.

8. Bekerjasama dengan pihak luar seperti Negara lainnya dalam hal menanggulangi kebakaran hutan. Negara yang potensial adalah Negara yang berbatasan dengan kita misalnya

dengan Malaysia berama pasukan BOMBA-nya. Atau juga dengan Australia bahkan Amerika Serikat.

Upaya penanggulangan kebakaran hutan ini tentunya harus sinkron dengan upaya pencegahan. Sebab walau bagaimanapun, pencegahan jauh lebih baik dari memanggulangi. Ada beragam cara yang bisa dilakukan dalam rangka mencegah kebakaran hutan khususnya yang disebabkan oleh perbuatan manusia seperti membuang puntung rokok di wilayah yang kering, kegiatan pembukaan lahan dan juga api unggun yang lupa dimatikan. Upaya pencegahannya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya mereka yang berhubungan langsung dengan hutan. Masyarakat ini biasanya tinggal di wilayah hutan dan memperluas area pertaniannya dengan membakar. Pemerintah harus serius mengadakan sosialisasi agar hal ini bisa dicegah.

Pada dasarnya upaya penanggulangan kebakaran hutan juga bisa disempurnakan jika pemerintah mau memanfaatkan teknologi semacam bom air. Atau bisa juga lebih lanjut ditemukan metode yang lebih efisien dan ampuh menaklukkan kobaran api di hutan. Langkah yang paling baik adalah dengan mengikutsertakan para perangkat pendidikan agar merancang teknologi maupun metode yang membantu pemerintah di level praktis. Sokongan dana dari pemerintah akan membuat program tersebut lebih baik dan terarah.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, mengenai pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis maka terdapat beberapa hal yang bisa peneliti jadikan sebagai kesimpulan dalam penulisan ini yaitu:

1) Bahwa pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan di Kabupaten Bengkalis dilihat dari semua indikator mulai dari penentuan standar, pemberian penilaian dan juga mengadakan perbaikan dapat dikatakan masih belum terlaksana dengan maksimal” hal ini dibuktikan dengan masih terdapatnya masyarakat yang dengan sengaja melakukan pembakaran ataupun terbakarnya lahan dengan faktor dari alam itu sendiri, pelaksana pengawasan yang dilakukan hanya pada saat cuaca ekstrim atau dimana curah hujan cukup rendah dan pemberian sanksi yang kurang tegas terhadap pelaku penyebab terjadinya kebakaran karena masih terdapatnya rasa solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat sehingga pelaku tidak takut terhadap sanksi yang diberikan.

2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lahan dalam mencegah kebakaran lahan yang dilihat dari semua indikator mulai dari Sumber Daya Manusia, dana/ biaya dan partisipasi masyarakat masih belum terlaksana dengan maksimal hal ini dikarenakan sumber daya yang kurang memadai, seperti personil pengawasan yang kurang yang tidak sebanding dengan areal yang diawasi atau yang terbakar. kecakapan dan tanggung jawab personil yang lemah, biaya personil yang tidak cukup untuk melakukan pengawasan serta masyarakat yang kurang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melakukan pengawasan. Yang menjadi faktor

sangat penting dalam melakukan pengawasan ini adalah faktor sumber daya manusia, karena apabila biaya telah ada dan masyarakat yang mendukung pelaksanaan pengawasan itu sendiri yang tidak memiliki kecakapan atau tanggung jawab dalam bertugas maka tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

2.Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh tersebut diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat menunjang dan membantu kelancaran dalam usaha meningkatkan kesehatan lingkungan yaitu:

1. Diharapkan supaya dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan lebih ditingkatkan untuk mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha yang menunjang berhasilnya lingkungan yang sehat.

2. Kiranya Pemerintah lebih memperhatikan untuk kiranya memberi bantuan alat-alat atau bahan-bahan yang berhubungan dengan keamanan daerah dari kebakaran

DAFTAR PUSTAKA

Adinugroho et al. 2005. *Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta

Anwar, azrul. 2011. *"Pengantar Epidemiologi"*, Edisi revisi. Binarupa Aksara, Jakarta Barat,

Charles. O. Jones. 2011 *"Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)"*,CV. Rajawali, Jakarta,

Cokroamidjojo, Bentoro. 2006, *Rangkuman Temu Wicara Ilmiah*.Bandung: STIALAN RI

D.Joko Subagyo. 2012 "Hukum Lingkungan,Masalah dan Penanggulangannya", PT. Rineka Cipta, Jakarta,

Idrus.2007, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

Miriam Budiardjo, Tri Nuke Pudjiastuti. 2006 *"Teori-Teori Politik Dewasa Ini"*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Pemudji.2005, *Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara

Poerwadarminta. 2005, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka

Soekamto, Soejono. 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

Sukarno. 2012, *Administrasi dan Management*. Bandung: Amanah

Sugiyono. 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung

Suryaningrat, Bayu. 2009, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Iip

Syafiie, Inu Kencana. 2007, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama

Syaufina. 2008, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Iip, Jakarta

Wahab, Abdul Solichin. 2011, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang

Wagio, Yudi. 2011, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Karya Nusantara

Sumber lain:

UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-Ii/2009 [Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan](#)

<http://www.menlh.go.id/pertemuan-menlh-indonesia-dan-singapura-penanggulangan-kebakaran-hutan-dan-lahan/#sthash.YTx6AZjd.dpuf>